



ANALISIS KONDISI KESENJANGAN EKONOMI DAERAH : STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

Azwar Iskandar^{a)}, Rahmaluddin Saragih^{b)}

Balai Diklat Keuangan Makassar^{a)}, Balai Diklat Keuangan Makassar^{b)}

azwar.iskandar@gmail.com^{a)}, rsaragih@gmail.com^{a)}

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama

[26 April 2018]

Dinyatakan Diterima

[17 Mei 2018]

KATA KUNCI:

kesenjangan, williamson, theil, klassen

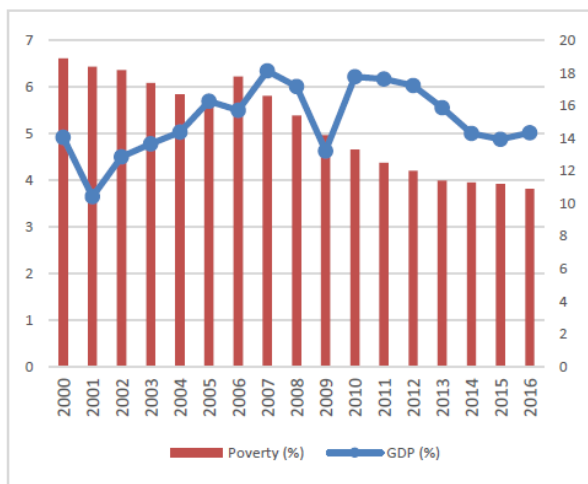
ABSTRAK

This research aims to estimate and analyze empirically the intra-regional disparity and economic growth in South Sulawesi's regencies/cities. Using time series data year 2011-2015 from Central Bureau of Statistics (BPS), this research applying the quantitative methods, i.e. Williamson Index, Theil Index, Sectoral Klassen Typology, and Pearson Correlation and Kuznet Hypothesis to capture the economic disparity. This study empirically found that economic disparity indicated by Williamson Index in 2011-2015 was 0,64 on average and continuously decreasing. Economic disparity indicated by Theil Index was fluctuating. From decomposition, it was mainly caused by intra regions disparity. Meanwhile, based on Klassen Typology, most of regions were in quadrant III (low income but high-growth) and IV (low income but high-growth). This study also found that the Kuznet 'U' curve, which identified the relationship between economic growth and disparity, was confirmed and applied in longterm in South Sulawesi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis secara empiris kesenjangan ekonomi antarwilayah di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari rilis publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari data time series tahunan periode 2011-2015 dan metode analisis kuantitatif pengukuran kesenjangan ekonomi, yaitu (1) Model Indeks Williamson, (2) Model Klassen Typology dan (3) Model Indeks Theil. Hasil penelitian ini secara empiris menemukan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson pada kurun waktu 2011-2015 memiliki kecenderungan menurun dengan kategori sedang dengan nilai rata-rata selama 5 tahun sebesar 0,64. Ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Theil, menunjukkan kesenjangan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi. Jika didekomposisi, tingkat kesenjangan antarwilayah lebih besar diakibatkan oleh besarnya kontribusi ketimpangan yang terjadi internal kabupaten/kota dibandingkan ketimpangan dalam provinsi (antarkabupaten/kota). Berdasarkan Tipologi Klassen, masih banyak daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada kuadran III dan IV, yaitu kabupaten/kota yang tergolong maju tapi tertekan dan relatif tertinggal (37,50%). Hipotesis "U" terbalik dari Kuznets cenderung berlaku pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka panjang.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia relatif stabil selama lebih dari satu dekade terakhir dengan pertumbuhan *Gross domestic Product* (GDP) tahunan mencapai 5,01% pada tahun 2016. Pencapaian ini juga didukung oleh tren penurunan persentase masyarakat miskin dengan indikator *poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)* pada angka 18,9% pada tahun 2000 menjadi 10,9% di penghujung tahun 2016 yang lalu (World Bank, 2018).

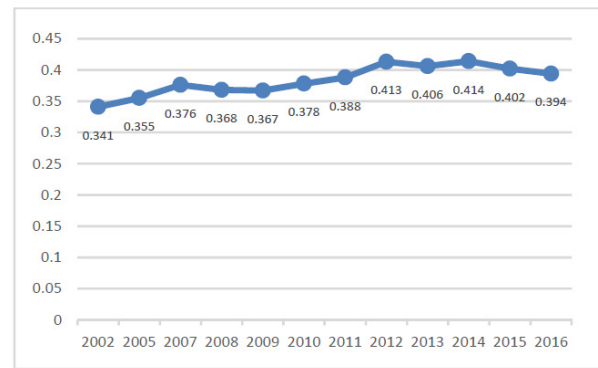


Grafik 1. GDP dan Poverty Headcount Ratio

Sumber : World Bank, 2018

Terlepas dari kesuksesan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan target pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, nyatanya masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di beberapa kawasan kepulauan Indonesia. Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Lima daerah tertinggi menurut tingkat kemiskinan pada kawasan ini adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Sementara itu, pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tinggi. Sebagai akibatnya, koefisien *Gini Ratio*¹ Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2002 sebesar 0,33 menjadi 0,408 pada tahun 2015 (BPS, 2016).

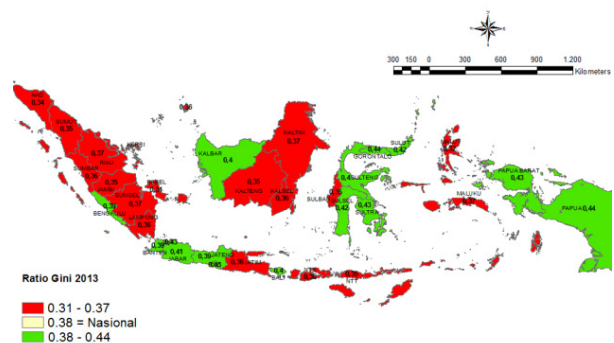
¹ *Gini Ratio* merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, *Gini Ratio* bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. (http://sipd.bangka.kemendagri.go.id/datacenter/index.php?page=indeks_gini).



Grafik 2. Gini Ratio Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Jika dilihat dari sebaran *Gini Ratio* pada seluruh provinsi di Indonesia, pada tahun 2013 (Gambar 1) distribusi pendapatan relatif merata di provinsi-provinsi di pulau Sumatera dan sebagian besar pulau Kalimantan. Sedangkan, provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di pulau Sulawesi dan Papua, distribusi pendapatannya relatif timpang. Provinsi-provinsi dengan nilai *Gini Ratio* di atas *Gini Ratio* rata-rata nasional (0,38) di antaranya Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.

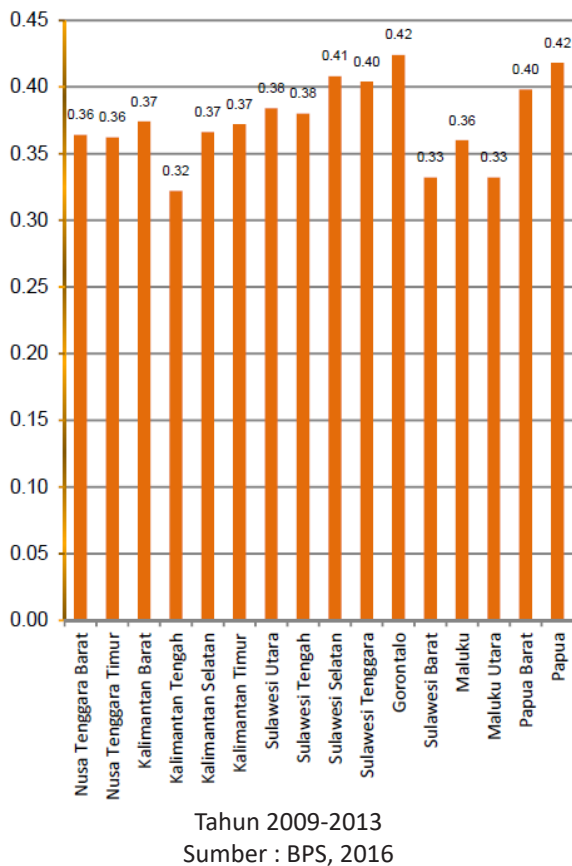


Gambar 1. Sebaran *Gini Ratio* Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2013

Sumber : Kemendagri RI, 2016

Khusus untuk provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia² ini, *Gini Ratio* rata-rata lima tahun terakhir (2009-2013) pada provinsi Sulawesi Selatan menjadi tertinggi kedua (0,41) setelah provinsi Gorontalo dan Papua yang memiliki *Gini Ratio* yang sama (0,42) (Lihat Grafik 2).

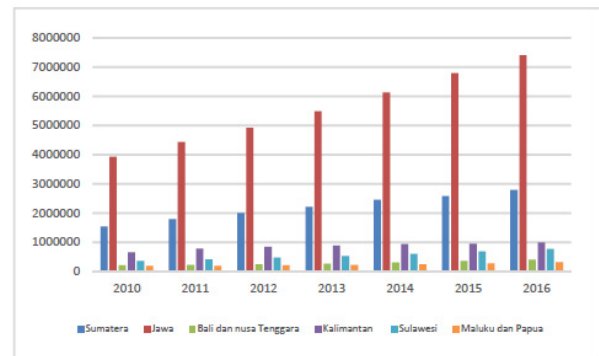
² Pembagian kawasan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 yaitu : (i) Kawasan Barat Indonesia terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Bali ; (ii) Kawasan Timur Indonesia terdiri dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sumber: <http://www.blu.djpb.kemenkeu.go.id>.



Di sisi lain, kesenjangan pencapaian pembangunan antarprovinsi juga semakin besar. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau dan kepulauan menyebabkan permasalahan kurangnya pemerataan pembangunan khususnya antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Pembangunan yang didominasi kegiatannya pada provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, membuat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia relatif masih jauh tertinggal.

Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen PDB Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan sisanya terdistribusi di seluruh provinsi pada Kawasan Timur Indonesia (BPS, 2018). Hal ini didukung oleh Sholihah (2014) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa fenomena pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di Kawasan Barat Indonesia. Padahal menurut Todaro (2006), masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan PDB, tetapi lebih kepada siapa yang akan menumbuhkan PDB tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan PDB ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam

pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.



Grafik 4. PDRB Menurut Pulau
(Ribuan Miliar Rupiah)
Sumber : BPS, 2018

Fakta tersebut tentunya menjadi sinyal akan pentingnya upaya dan peran pemerintah dalam merancang dan menciptakan konsep yang lebih luas yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan atau dikenal dengan istilah inklusif sebagaimana yang dijelaskan oleh Klasen (2010) bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Dalam hal ini, konsep pertumbuhan inklusif itu berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang *pro poor*. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan jumlah kelompok yang "tidak diuntungkan" (marginal) dalam perekonomian.

Meskipun bukan lagi menjadi isu yang terbilang baru, kesenjangan ekonomi masyarakat selalu menjadi pembahasan yang menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk para peneliti dan pemegang kebijakan terkait. Berbagai analisis yang mengukur kesenjangan ekonomi dan sosial terus dilakukan, termasuk bagaimana metode mengukur kesenjangan tersebut. Namun, banyak kajian dan referensi yang berfokus pada analisis pengukuran dan determinan kesenjangan ekonomi, masih terbatas pada *scope* nasional yang relatif cukup besar dan luas. Kajian dan analisis kesenjangan ekonomi pada tingkat regional (daerah) dirasakan masih terbatas dan menjadi salah satu poin yang dapat menyebabkan upaya pemerintah dalam kasus ini menjadi kurang optimal. Hal ini mengakibatkan pemahaman dan wawasan tentang dinamiknya menjadi terbatas, sehingga seyogyanya menjadi agenda yang sangat penting untuk diprioritaskan. Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan antardaerah tetap harus diupayakan untuk dikurangi. Untuk memberikan orientasi dalam upaya mengurangi kesenjangan tersebut, diperlukan data dan informasi objektif, serta teknik pengolahan data tertentu sehingga dapat memberi gambaran adanya kesenjangan antarwilayah.

Untuk menjembatani *gap* tersebut di atas, penelitian ini mencoba menganalisis kesenjangan ekonomi di tingkat regional (daerah) khususnya pada kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia, dimana mengambil data pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai studi kasus untuk mewakili kawasan ini. Penelitian ini menjadi berbeda dan terbaru dari kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya yang masih melihat dan mengkaji kesenjangan ekonomi dalam skala nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan ekonomi yang berbasis pada bukti dan temuan empiris. Penelitian ini memilih Provinsi Sulawesi Selatan karena dua alasan: (i) capaian Indeks Gini provinsi yang relatif tinggi (tertinggi kedua) di Kawasan Timur Indonesia; (ii) ketersediaan data yang relatif lebih lengkap dibanding data pada provinsi lainnya secara komprehensif (keseluruhan) terkait dengan model dan analisis penelitian.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis secara empiris kesenjangan ekonomi antarwilayah di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah

Sjafrizal (2008) menyatakan kesenjangan ekonomi antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Terdapat kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Kesenjangan ekonomi antarwilayah sering menjadi permasalahan serius karena beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Hal ini telah memicu migrasi penduduk dari wilayah terbelakang ke wilayah maju sehingga timbul permasalahan sosial ekonomi di wilayah maju. Selain itu, kemajuan perekonomian yang tidak merata di setiap wilayah dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antarwilayah. Apabila dibiarkan semakin parah, dapat mengganggu kestabilan perekonomian negara.

Secara teori, permasalahan kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat dijelaskan menggunakan Hipotesis Neoklasik. Penganut Hipotesis Neoklasik menyatakan pada permulaan proses pembangunan suatu negara, kesenjangan ekonomi antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai kesenjangan tersebut mencapai titik puncak. Bila proses pembangunan berlanjut, maka secara berangsur-angsur kesenjangan ekonomi antarwilayah akan menurun. Hal tersebut dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru dimulai, peluang pembangunan

yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah yang tertinggal tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena pertumbuhan ekonomi lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan, maka kesenjangan ekonomi antarwilayah cenderung meningkat. Keadaan yang berbeda terjadi di negara maju dimana kondisi daerahnya umumnya dalam kondisi yang lebih baik dari segi sarana dan prasarana serta kualitas SDM. Dalam kondisi demikian, setiap peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antardaerah. Akibatnya, proses pembangunan pada negara maju akan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah (Anggraeni, 2012).

Bort dalam Sjafrizal (2008) menjadi pelopor yang mendasarkan analisisnya pada teori ekonomi Neoklasik, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Bort menyatakan pada awal pembangunan suatu negara, kesenjangan ekonomi antar wilayah cenderung meningkat. Hal ini disebabkan mobilitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) kurang berjalan lancar. Dampaknya modal dan tenaga kerja akan terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga kesenjangan ekonomi antarwilayah melebar (*divergen*). Bila pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya fasilitas maka mobilitas faktor produksi semakin lancar sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah akan berkurang (*convergen*).

Menurut Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "*trickle down effects*" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas. Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi.

Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi

pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang tinggi. Namun, pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznet. Sesuai dengan rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini dan pertumbuhan PDB perkapita yang akan terlihat seperti kurva yang berbentuk huruf U terbalik. Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

2.2. Indikator Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah

Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat diukur menggunakan perhitungan indeks ketimpangan regional Williamson. Istilah indeks Williamson muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur kesenjangan ekonomi antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang. Secara statistik, indeks Williamson ini adalah *coefficient of variation* yang biasa digunakan untuk mengukur perbedaan. Indeks ini menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Hal yang dipersoalkan bukan antara kelompok kaya dan miskin, tetapi antara daerah maju dan terbelakang. Dari indeks Williamson dapat diketahui kesenjangan ekonomi antarwilayah yang terjadi semakin melebar atau berkurang. Jika semakin tinggi nilai indeks Williamson, berarti kesenjangan ekonomi antar wilayah semakin besar, dan sebaliknya (Anggraeni, 2012).

2.3. Penelitian Terdahulu

Fabia (2006) menganalisis dampak otonomi daerah terhadap kondisi ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di Pulau Sumatera. Periode tahun penelitian ini adalah tahun 1995, tahun 2001, dan tahun 2004. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun analisis sebagai variabel dependen dan PDRB per kapita tahun dasar dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan antarkabupaten/kota di pulau Sumatera cenderung konvergen. Hal ini dilihat dari nilai koefisien regresi lebih kecil dari nol. Hasil uji menunjukkan otonomi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan konvergensi pendapatan dan menurunnya ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di Pulau Sumatera. PDRB per kapita tahun dasar signifikan mempengaruhi PDRB per kapita tahun analisis sedangkan tingkat pendidikan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan kurang mempengaruhi peningkatan konvergensi pada konvergensi bersyarat.

Satrio (2009) menganalisis ketimpangan pendapatan antarpulau di Indonesia. Periode penelitian ini adalah tahun 1996-2006. Metode yang digunakan

yaitu indeks Williamson, *trend* ketimpangan, analisis korelasi dan koefisien determinan. Hasil penelitian yaitu ketimpangan pendapatan antarpulau di Indonesia tergolong taraf rendah dengan nilai indeks ketimpangan antara 0,210 sampai 0,261, yang berarti masih berada di bawah 0,35. Untuk ketimpangan pendapatan yang terjadi di dalam setiap pulau berada pada ketimpangan taraf tinggi untuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan Irian yaitu antara 0,521 sampai 0,996, pada Pulau Sulawesi taraf ketimpangannya rendah yaitu antara 0,050-0,109, sedangkan Pulau Bali taraf ketimpangannya sedang yaitu antara 0,379-0,498. Analisis *trend* ketimpangan pendapatan antarpulau menunjukkan *trend* menurun. Ketimpangan pendapatan menurut pulau juga menunjukkan *trend* yang menurun kecuali Pulau Jawa dan Sulawesi. Hasil analisis korelasi dan koefisien determinan menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan pendapatan lemah dan besarnya kontribusi pertumbuhan PDRB terhadap perubahan ketimpangan pendapatan kecil yaitu sebesar 14 persen.

Wicaksono (2010) meneliti tentang analisis disparitas pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2007 memperoleh kesimpulan antara lain bahwa perekonomian Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh sektor industri. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kontribusi sektor industri dengan nilai lebih besar dari 30 persen. Kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan adalah Kabupaten Cilacap, karena terdapat industri pengolahan minyak dan gas milik negara.

Syahrial (2014) melakukan penelitian tentang analisis klasifikasi daerah dan disparitas pembangunan ekonomi antarprovinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi daerah, disparitas pembangunan ekonomi antarprovinsi serta untuk mengetahui hubungan antara pendapatan per kapita dan disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2004 – 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari instansi pemerintah serta situs BPS. Metode analisis yang digunakan adalah tipologi Klassen, indeks Williamson dan tren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan 2004–2012 provinsi yang termasuk sebagai provinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh adalah Provinsi Kepulauan Riau, provinsi yang maju tapi tertekan adalah Provinsi Riau, provinsi dengan klasifikasi daerah yang berkembang cepat adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sementara itu, provinsi yang relatif tertinggal adalah Provinsi Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung. Disparitas pembangunan antarprovinsi di Pulau Sumatera cenderung menurun (semakin merata) dengan pembangunan yang moderat (sedang). Hubungan antara pendapatan per kapita dan disparitas

pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera adalah berhubungan negatif atau berbanding terbalik.

Penelitian ini berbeda dan terbaru dari beberapa penelitian sebelumnya dengan beberapa alasan bahwa: (i) penelitian ini menggunakan periode penelitian terbaru dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan basis data spasial (kabupaten/kota); (ii) hasil analisis kesenjangan ekonomi dari penelitian ini juga dikuatkan dengan pembuktian hipotesis Kuznet dan analisis kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah dan arah perkembangannya yang dapat diindikasikan dari nilai disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

3. METODE PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran mengenai kesenjangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang diwakili oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari rilis publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari data *time series* tahunan periode 2011-2015³ berupa data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) kabupaten/kota, jumlah penduduk per kabupaten/kota dan jumlah penduduk provinsi, untuk menganalisis kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pemilihan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar pada laporan institusi terkait (BPS dan DJPK) yang memuat data/informasi yang terkait dengan penelitian pada periode penelitian;
2. Kabupaten/kota telah berdiri sebelum periode penelitian.

Berdasarkan pada kriteria pemilihan sampel di atas, maka kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 kabupaten/kota.

Variabel-variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan model analisis penelitian yaitu variabel : (i) Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota; (ii) Pendapatan Provinsi; (iii) Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota; (iii) Jumlah Penduduk Provinsi ;

Operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

³ Sesuai ketersediaan data pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi	
ANALISIS KESENJANGAN EKONOMI :		
Pendapatan Per Kapita Kabupaten/ Kota (y_i)	Perdapatan Per Kapita pada Kabupaten/Kota	Diproski oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/ Kota dibagi dengan jumlah penduduk pada Kabupaten/ Kota
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (f_i)	Jumlah penduduk (jiwa) pada kabupaten/kota	
Jumlah Penduduk Provinsi (F)	Jumlah penduduk (jiwa) pada Provinsi	
Pendapatan Provinsi (Y)	Pertumbuhan ekonomi pada Provinsi	Diproski oleh nilai/ data Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)
Laju Pertumbuhan (R_i)	Laju pertumbuhan PDRB ADHB kabupaten/kota i di Provinsi Sulawesi Selatan	
Rata-rata Laju Pertumbuhan (R)	Rata-rata laju pertumbuhan PDRB ADHB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan	
ANALISIS HIPOTESIS KUZNET DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT :		
Pertumbuhan Ekonomi (X)	Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	
Indeks Williamson/ Indeks Theil (Y)	Nilai Indeks Williamson dan Indeks Theil hasil analisis kesenjangan ekonomi.	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai IPM per kabupaten/kota	

Sumber : BPS (2018)

Untuk mencapai tujuan penelitian, studi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk keperluan pengolahan data analisis, penelitian ini menggunakan *software/program Microsoft Excel*, dan *IBM SPSS*.

Penelitian ini menggunakan Model dan teknik analisis pengukuran kesenjangan ekonomi, yaitu (1) Model Indeks Williamson, (2) Model Klassen Typology dan (3) Model Indeks Theil.

Pertama, model Indeks Williamson mengukur kesenjangan ekonomi antarwilayah (*regional inequality*) (Kuncoro, 2004). Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau *unweighted index*) untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah nilai PDRB per kapita penduduk dan PDRB per kapita sektoral Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota serta jumlah penduduk baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Adapun rumus Williamson dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{F}}}{Y}$$

dimana :

- IW_{it} : Indeks Williamson yang menunjukkan kesenjangan ekonomi di kabupaten/kota i pada waktu t
- Y_i : Pendapatan per rata-rata kapita penduduk kabupaten/kota t
- Y : Pendapatan per kapita rata-rata penduduk provinsi
- f_{it} : Jumlah penduduk di kabupaten/kota i pada waktu t
- F : Jumlah penduduk provinsi pada waktu t

Jika nilai indeks ketimpangan Williamson mendekati nol, maka kondisi tersebut menunjukan kesenjangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai indeks semakin mendekati 1, maka kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Kriteria untuk menentukan tingkat kesenjangan adalah sebagai berikut (Anggraeni, 2012):

- $IW < 0,35$: Kesenjangan ekonomi taraf rendah
- $0,35 \leq IW \leq 0,5$: Kesenjangan ekonomi taraf sedang
- $IW > 0,5$: Kesenjangan ekonomi taraf tinggi

Kedua, selain dengan Indeks Williamson, penelitian ini juga menggunakan metode *Klassen Typology*. Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola pertumbuhan ekonomi setiap daerah sehingga diketahui apakah pelaksanaan pembangunan telah terjadi secara merata di seluruh wilayah atau sebaliknya. *Klassen Typology* membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat klasifikasi daerah yang berbeda yaitu (Anggraeni, 2012):

Tabel 2
Klasifikasi *Klassen Typology*

Kuadran	Identitas	
I	Daerah maju dan cepat tumbuh	Merupakan wilayah yang mengalami tingkat pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
II	Daerah maju tapi tertekan	Merupakan wilayah yang relatif maju karena PDRB per kapita daerah lebih tinggi dari rata-rata seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir tingkat pertumbuhan PDRB daerah menurun, lebih rendah dibanding rata-rata seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
III	Daerah berkembang cepat	Merupakan wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB daerah tinggi, namun PDRB per kapita daerahnya relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
IV	Daerah relatif tertinggal	Merupakan wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan PDRB daerah dan PDRB per kapita daerah yang berada dibawah rata-rata dari seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini masih relatif rendah.

Klasifikasi :

	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$R_i > R$	Kuadran I Daerah maju dan cepat tumbuh	Kuadran III Daerah berkembang cepat
$R_i < R$	Kuadran II Daerah maju tapi tertekan	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal

dimana:

- R_i : laju pertumbuhan PDRB ADHK kabupaten/kota i di Provinsi Sulawesi Selatan
- R : rata-rata laju pertumbuhan PDRB ADHK seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan
- Y_i : PDRB per kapita kabupaten/kota i di Provinsi Sulawesi Selatan
- Y : rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan t

Ketiga, untuk mengetahui proporsi penyebab terjadinya ketimpangan dan jenis ketimpangan yang terjadi apakah termasuk ketimpangan antarwilayah atau ketimpangan internal wilayah, penelitian ini juga menggunakan Indeks Theil. Karakteristik utama dari Indeks Theil ini adalah kemampuannya untuk membedakan ketimpangan antarwilayah (*between-region inequality*) dan ketimpangan dalam suatu wilayah (*withinregion inequality*) (Kuncoro, 2002).

Indeks Theil dinyatakan dalam formula sebagai berikut:

Indeks Theil dalam wilayah:

$$TW = \sum_i \left(\frac{y_i}{Y_j} \right) \log \left(\frac{y_i/Y_j}{n_i/n_j} \right)$$

dimana:

- TW : Indeks Theil dalam wilayah (*within-region inequality*)
 y_i : PDRB per kapita propinsi i
 Y_j : PDRB per kapita kabupaten/kota j
 n_i : Jumlah penduduk propinsi i
 n_j : Jumlah penduduk Kabupaten/kota i

Indeks Theil antar wilayah:

$$TB = \sum_j (Y_j) \log \left(\frac{Y_j}{X_j} \right)$$

dimana:

- TB : Indeks Theil antarwilayah (*between-region inequality*)
 Y_j : Rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota j
 X_j : Jumlah penduduk Kabupaten/kota j

Total Indeks Theil :

$$T_{\text{total}} = TW + TB$$

Selanjutnya, untuk menguji Hipotesis Kuznet terjadi dalam fenomena kesenjangan ekonomi, penelitian ini juga menggunakan metode Korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan variabel ketimpangan pendapatan. Pengukuran korelasi ini untuk menguji hipotesis Kuznets. Adapun rumus korelasi Pearson yang digunakan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2007):

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\left(n \sum (X)^2 - (\sum X)^2 \right) \left(n \sum (Y)^2 - (\sum Y)^2 \right)}}$$

dimana:

- r : nilai korelasi
n : banyaknya sampel
X : pertumbuhan ekonomi (variabel independen)
Y : indeks willamson/indeks entropi theil (variabel dependen)

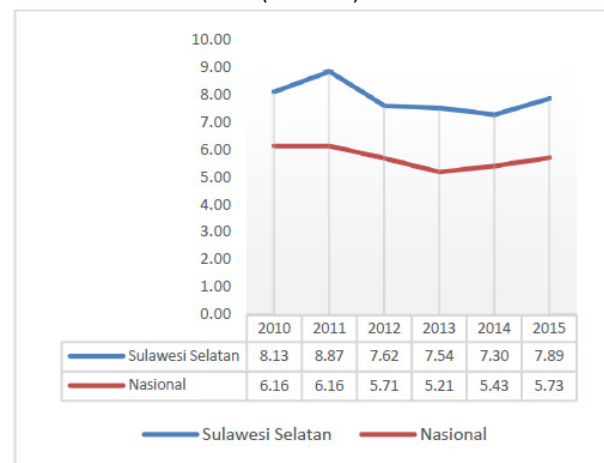
Adapun analisis tambahan untuk menguatkan hasil penelitian, yaitu berupa analisis kesejahteraan masyarakat yang diproksi oleh nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penelitian ini menggunakan analisis statistika deskriptif berupa *mean*, grafik atau tabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kesenjangan Ekonomi

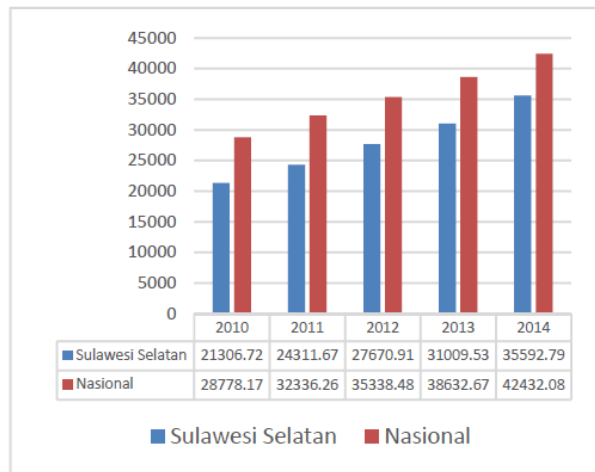
Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Peran Provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis dalam mendukung Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel khususnya sebagai simpul pertanian pangan, simpul perikanan, dan kluster industri. Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pelabuhan internasional yang semakin meningkatkan posisi strategisnya.

Kinerja perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2011- 2015 cenderung berfluktuatif namun berada di atas rata-rata nasional (Grafik 5).



Grafik 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional
Sumber : BPS (2015)

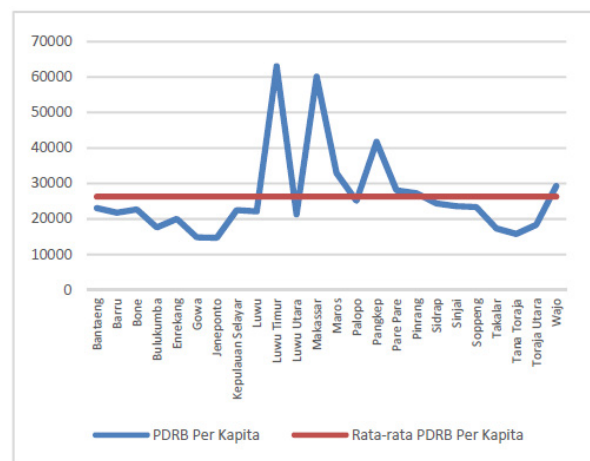
Selama kurun waktu tersebut laju pertumbuhan rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 7,89 persen, berada di atas rata-rata nasional 5,73 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan turut didukung oleh pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah di wilayah ini.



Grafik 6. Pendapatan Per Kapita
Sulawesi Selatan dan Nasional
Sumber : BPS (2015)

Selama kurun waktu 2010-2014, pendapatan per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat, namun masih berada di bawah pendapatan per kapita nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Sulawesi Selatan secara umum (rata-rata) relatif lebih rendah secara nasional. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional sebesar 74,04 persen, maka pada tahun 2014 rasionya meningkat menjadi 83,88 persen (Grafik 6). Apabila pertumbuhan penduduk antarprovinsi tidak terlalu berbeda jauh, kinerja rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik dari provinsi lain di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan cukup tinggi namun kesenjangan ekonomi antarkabupaten kurang merata, yang terlihat dari besarnya *gap* antara kabupaten dengan rata-rata PDRB perkapita tertinggi dan rata-rata PDRB perkapita terendah. Pada Grafik 7 terlihat bahwa terjadi *gap* yang sangat lebar antara kabupaten dengan rata-rata pendapatan per kapita tertinggi dan kabupaten dengan rata-rata pendapatan per kapita terendah dalam kurun waktu 2011-2015.



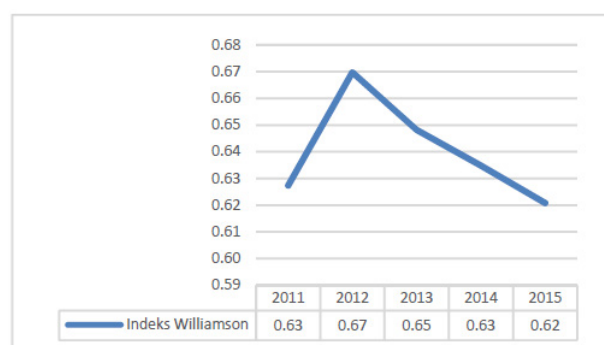
Grafik 7. Rata-rata Pendapatan Per Kapita Kabupaten/
Kota di Sulawesi Selatan
Tahun 2011-2015

Terdapatnya beberapa daerah yang cenderung maju dengan kecenderungan aktivitas perekonomian yang berkembang cepat, disebabkan karena perbedaan kondisi geografis, sasaran program, serta kebijakan, dan juga kondisi sarana dan prasarana antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Hal tersebut selanjutnya dapat memicu terjadinya ketimpangan wilayah.

Kesenjangan perekonomian antarwilayah dapat digambarkan dari output regional berdasarkan PDRB perkapita. Kesenjangan pendapatan antarwilayah menunjukkan angka cukup tinggi atau disparitas cukup tinggi, diakibatkan adanya nilai PDRB perkapita di beberapa kabupaten/kota yang jauh lebih besar dari rata-rata PDB perkapita provinsi, di antaranya Luwu Timur, Makassar dan Pangkep. Sebaliknya beberapa provinsi dengan PDRB perkapita sangat rendah, meliputi Gowa, Jeneponto, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Tingginya PDRB perkapita di Luwu Timur disebabkan oleh sumbangan sektor pertambangan, penggalian, transportasi, komunikasi, keuangan asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, asuransi, dan bisnis jasa. Kabupaten Luwu Timur terkenal dengan pertambangan nikel yang besar. Sedangkan untuk Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar, sektor yang menjadi proporsi ketimpangan dalam kota ini adalah industri pengolahan dan sektor lainnya yang menjadi pemicu ketimpangan. Untuk Kabupaten Pangkep, sektor industri pengolahan yang sangat berkembang adalah pengolahan industri semen Tonasa. Sementara Kota Makassar juga merupakan pusat kegiatan sektor industri, jasa dan perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil analisis Indeks Williamson pada Grafik 8 menunjukkan tingkat kesenjangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson pada kurun waktu 2011-2015 memiliki kecenderungan menurun. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Selatan berkategori tinggi dengan nilai rata-rata selama 5 tahun sebesar 0,64. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Sulawesi Selatan adalah rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

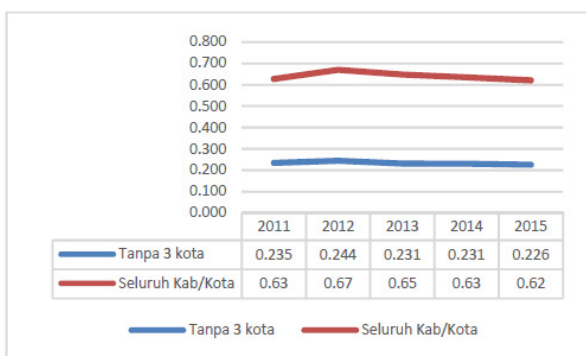


Grafik 8. Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011-2015
Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tingkat disparitas atau kesenjangan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kecenderungan peningkatan di tahun 2011 hingga 2012 terlihat dari hasil analisis dari 0,63 menjadi 0,67. Namun setelah 2012 terjadi penurunan hingga tahun 2015. Nilai Indeks Williamson yang berada di atas 0,5 ini menunjukkan telah terjadi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, dan nilai tersebut menunjukkan tingginya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejak tahun 2012, pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan secara efektif ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan ini diikuti dengan semakin menurunnya nilai indeks kesenjangan ekonomi hingga tahun-tahun berikutnya. Pada periode tersebut, pelaksanaan pembangunan terus berlanjut di seluruh kabupaten dan kota dimana arah pembangunan tersebut telah disesuaikan dengan kepentingan dan potensi daerah masing-masing. Sehingga setiap daerah umumnya telah berada dalam kondisi yang lebih baik dari segi sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia. Dalam kondisi demikian, setiap kesempatan dan peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Akibatnya, proses pembangunan dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun nilai kesenjangan ekonomi tersebut berangsur-angsur menurun, namun tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong dalam kategori kesenjangan taraf tinggi karena nilainya diatas batas 0,5.

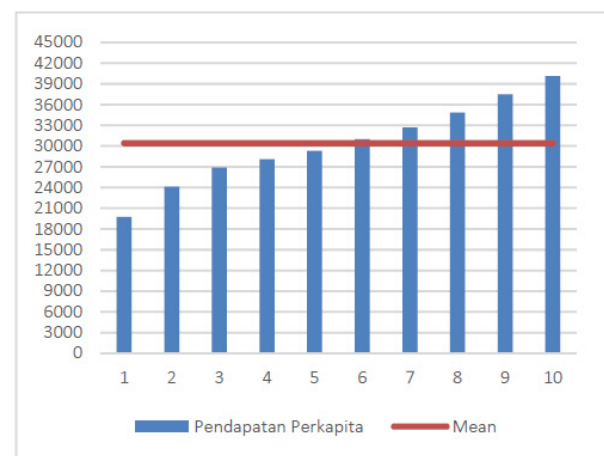
Selain itu, jika melihat ketimpangan yang ditunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dengan mengeluarkan 3 kota besar di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita di atas rata-rata provinsi yaitu Luwu Timur, Makassar dan Pangkep, terlihat adanya penurunan ketimpangan yang sangat drastis (Grafik 9). Jadi secara umum, peningkatan ketimpangan atau memburuknya ketimpangan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan lebih dikarenakan kehadiran tiga kota tersebut.



Grafik 9. Indeks Williamson Tanpa 3 Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015
Sumber : Hasil olah data

Perlu dipahami bahwa terjadinya kesenjangan antarwilayah di Indonesia, termasuk pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan karena keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik masing-masing wilayah. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun di sisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik. Untuk itu, maka penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman secara komprehensif terhadap persoalan kesenjangan tersebut perlu menjadi acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan, sehingga dapat mendukung upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketidakseimbangan perekonomian antarwilayah yang ditandai dengan ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan seyogyanya dianggap sebagai masalah serius dalam perekonomian. Dalam masalah inilah seharusnya desentralisasi bisa memberikan kontribusi yang paling signifikan. Meskipun, dalam banyak teori desentralisasi juga berpotensi membuat disparitas atau ketimpangan semakin parah apabila tidak ada kebijakan khusus yang memprioritaskan upaya mengurangi kesenjangan itu sendiri (Bappenas, 2011).



Grafik 10. Persentil Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015
Sumber : Hasil olah data

Grafik 10 di atas menunjukkan bahwa pendapatan perkapita mulai meningkat pada persentil ke 60 dan 40 persen memiliki pendapatan perkapita di atas rata-rata. Hal ini berarti bahwa lebih dari 50 persen masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan masih memiliki pendapatan di bawah rata-rata pendapatan provinsi.

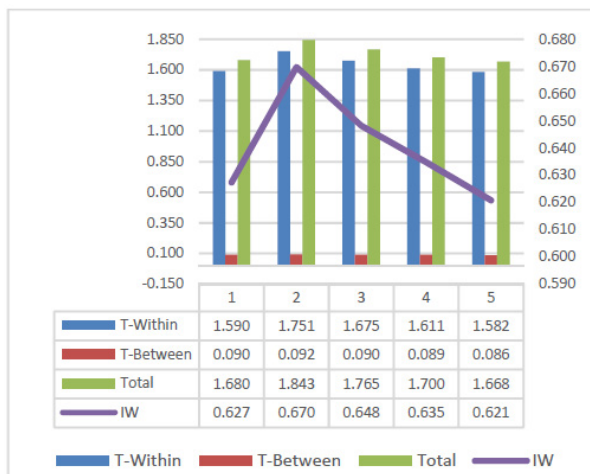
Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan antarwilayah tetap harus diupayakan untuk dikurangi. Salah satu prinsip dasar yang harus dipegang para pengambil kebijakan adalah bahwa kesenjangan perekonomian antar daerah masih dapat ditoleransi sejauh tidak mengganggu pertumbuhan

ekonomi dan tidak menciptakan ketidakmerataan pendapatan yang luar biasa dalam masyarakat. Dengan kata lain, upaya melakukan redistribusi pendapatan masyarakat haruslah mendapatkan prioritas utama dibandingkan redistribusi perekonomian daerah. Satu hal lagi yang harus dilakukan dalam upaya mengurangi kesenjangan perekonomian antar daerah adalah mengurangi jarak antara daerah terkaya dengan daerah termiskin, melalui upaya khusus untuk mengangkat daerah termiskin secara signifikan.

Indeks Williamson dapat menunjukkan tingkat ketimpangan suatu wilayah, namun analisis ketimpangan ini dirasa kurang mendalam dalam melihat penyebab ketimpangan hubungan antarwilayah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga digunakan analisis Indeks Theil untuk lebih jauh mengkaji besarnya kesenjangan (disparitas total) yang dikomposisi menjadi dua, yaitu kesenjangan antarkabupaten/kota (*between*) dan kesenjangan dalam internal kabupaten/kota (*within*).

Tabel 3
Indeks Theil Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011-2015

Tipe	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
T-Within	1.590	1.751	1.675	1.611	1.582
T-Between	0.090	0.092	0.090	0.089	0.086
Total	1.680	1.843	1.765	1.700	1.668
% T-Within	94.64	95.01	94.90	94.76	94.84
% T-Between	5.36	4.99	5.10	5.24	5.16



Sumber : Hasil olah data
Grafik 11. Indeks Williamson dan Indeks Theil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015
Sumber : Hasil olah data

Ketimpangan wilayah diukur dengan Indeks Theil dari PDRB perkapita dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011-2015), menunjukkan kesenjangan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi. Dari Tabel 3 dan Grafik 11, diperlihatkan nilai Theil Indeks tahun 2011-2015 di antara 1,668 hingga 1,843

dengan nilai IW berkisar antara 0,621 hingga 0,670. Jika didekomposisi, tingkat kesenjangan antarwilayah lebih besar diakibatkan oleh besarnya kontribusi ketimpangan yang terjadi internal kabupaten/kota dibandingkan ketimpangan dalam provinsi (antarkabupaten/kota), dimana pada tahun 2015 ketimpangan internal kabupaten/kota (*within-region inequality*) menyumbang sekitar 94,84 persen terhadap ketimpangan total.

Perkembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan relatif stabil, tanpa adanya pemekaran wilayah administratif, baik kabupaten maupun kota selama kurun waktu penelitian. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Wilayah tersebut dapat diklasifikasikan menggunakan alat analisis *Klassen Typology* yang berdasarkan dua indikator utama, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan (PDRB) per kapita daerah. *Klassen Typology* membagi daerah yang diamati dalam empat klasifikasi, yaitu: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*); (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*); (3) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*); dan (4) daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Berdasarkan hasil analisis *Klassen Typology*, terdapat beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pergeseran tipologi (perpindahan posisi kuadran). Namun, dari analisis juga ditemukan beberapa wilayah yang selalu berada pada tipologi yang sama (pada posisi kuadran yang tetap). Pengklasifikasian ini bersifat dinamis karena sangat tergantung pada paradigma pembangunan di provinsi yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa dalam periode waktu penelitian yang berbeda, pengklasifikasian juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita di masing-masing daerah pada saat itu.

Tabel 4
Hasil Klasifikasi Klassen Typology Per Tahun

Kab/Kota	Tahun/Kuadran				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bantaeng	3	3	3	4	3
Barru	3	3	4	4	4
Bone	3	4	3	3	3
Bulukumba	3	3	3	4	3
Enrekang	4	4	4	4	4
Gowa	3	3	4	4	3
Jeneponto	4	4	2	4	4
Kepulauan Selayar	4	3	2	3	3
Luwu	4	3	2	3	4
Luwu Timur	2	2	1	2	2
Luwu Utara	4	4	3	4	4

Makassar	1	1	2	1	1
Maros	3	3	2	1	2
Palopo	2	2	4	4	4
Pangkep	1	1	1	1	1
Pare-pare	1	1	2	2	2
Pinrang	1	3	1	1	1
Sindereng Rappang	1	4	4	3	3
Sinjai	4	2	4	3	4
Soppeng	4	4	4	4	4
Takalar	4	2	2	3	3
Tana Toraja	3	4	4	4	4
Toraja Utara	3	3	4	3	3
Wajo	2	2	1	2	2

Sumber : Hasil olah data

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 2 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal yang dicirikan dengan tingkat pertumbuhan dan pendapatan yang rendah selama periode penelitian, yaitu Enrekang dan Soppeng. Kabupaten/kota lainnya berada pada interval antara maju dan berkembang. Kabupaten/kota yang tetap berada pada satu kelas tipologi dalam kategori daerah maju dan cepat tumbuh hanyalah kabupaten Pangkep.

Jika tipologi kesenjangan ini dilihat dari nilai rata-rata pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan pada periode 2011-2015, diperoleh tipologi Klassen sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Klasifikasi Klassen Typology
Rata-rata Tahun 2011-2015

	$Y_i > \bar{y}$	$Y_i < \bar{y}$
$R_i > R$	Kuadran I Daerah maju dan cepat tumbuh : Makassar Pangkep Pinrang	Kuadran III Daerah berkembang cepat : Bantaeng Bone Bulukumba Gowa Kepulauan Selayar Pare-pare Sindereng Rappang Takalar Toraja Utara

$R_i < R$	Kuadran II Daerah maju tetapi tertekan : Luwu Timur Maros Wajo	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal : Barro Enrekang Jeneponto Luwu Luwu Utara Palopo Sinjai Soppeng Tana Toraja
-----------	---	--

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan Tabel 5 di atas, kita dapat membagi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi 4 klasifikasi sesuai dengan Tipologi Klassen. Kota Makassar, Pangkep dan Pinrang termasuk dalam klasifikasi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh. Sembilan daerah lainnya masuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, masing-masing Bantaeng, Bone, Bulukumba, Gowa, Kepulauan Selayar, Pare-pare, Sidrap, Takalar dan Toraja Utara. Kabupaten/Kota ini mempunyai potensi pertumbuhan yang cepat tetapi pendapatannya masih di bawah pendapatan rata-rata Propinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan Kabupaten tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya, sehingga di masa yang akan datang harus terus dikembangkan agar diperoleh pendapatan perkapita yang tidak relatif rendah.

Sedangkan daerah lainnya masuk dalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan, yaitu kabupaten Luwu Timur, Maros dan Wajo. Kabupaten/kota ini adalah kabupaten/kota yang maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, akibat tertekannya kegiatan utama kabupaten/kota yang bersangkutan. Sementara itu, dari keempat klasifikasi tersebut, berdasarkan data rata-rata pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan pada periode 2011-2015, terdapat beberapa kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah yang relatif tertinggal, yaitu kabupaten Barro, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, Soppeng, dan Tana Toraja.

Tabel 6
Jumlah Kabupaten/Kota Klasifikasi Klassen Typology
Rata-rata Tahun 2011-2015

Tipologi (Kuadran)	Jumlah Kab/Kota	% Jumlah Kab/Kota
I	3	12,50
II	3	12,50
III	9	37,50
IV	9	37,50
Jumlah	24	100

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan hasil analisis di atas, gambaran kesenjangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditunjukkan oleh masih banyaknya daerah yang berada pada kuadran III dan IV, yaitu kabupaten/kota yang tergolong maju tapi tertekan dan relatif tertinggal (37,50%). Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi serta tingginya ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota membuat kondisi perekonomian relatif tertinggal.

4.2 Analisis Korelasi Pearson dan Hipotesis Kuznet

Hasil analisis korelasi Pearson pada Tabel 7 menunjukkan tidak adanya korelasi yang signifikan (nilai Sig. $\geq 0,05$) antara laju pertumbuhan ekonomi dan indeks ketimpangan (baik dengan nilai Indeks Williamson maupun Indeks Theil). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini pada jangka panjang pada dasarnya akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembuktian analisis ini menunjukkan bahwa Hipotesis "U" terbalik dari Kuznet cenderung berlaku pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, paling tidak untuk jangka panjang (melebihi periode penelitian yang hanya 5 tahun). Faktor utama yang menyebabkan cenderung berlakunya Hipotesis Kuznet ini adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik pada tahun-tahun berikutnya yang diiringi dengan tingkat kesenjangan yang juga cenderung menurun.

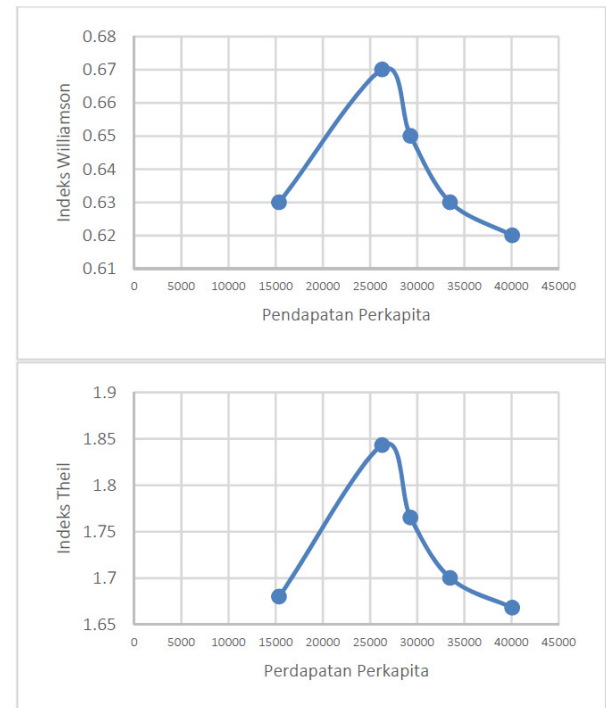
Tabel 7
Korelasi Pearson Pertumbuhan Ekonomi
dan Indeks Ketimpangan

Correlations			
		Indeks Williamson	Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Williamson	Pearson Correlation	1	-.317
	Sig. (2-tailed)		.603
	N	5	5
Pertumbuhan Ekonomi	Pearson Correlation	-.317	1
	Sig. (2-tailed)	.603	
	N	5	5

Correlations			
		Indeks Theil	Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Theil	Pearson Correlation	1	-.414
	Sig. (2-tailed)		.488
	N	5	5

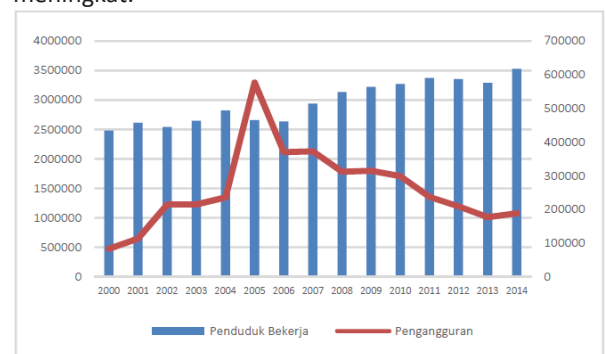
Pertumbuhan Ekonomi	Pearson Correlation	-.414	1
	Sig. (2-tailed)	.488	
	N	5	5

Sumber : Hasil olah data



Grafik 12. Kurva Hubungan antara Indeks Ketimpangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015

Selain pertumbuhan, di antara faktor utama lainnya yang mendorong hipotesis Kuznet ini cenderung berlaku adalah adanya tingkat pengangguran yang terus menurun dengan jumlah penduduk yang bekerja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari Grafik 13 di bawah terlihat bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sejak lebih dari 10 tahun lalu hingga saat ini terus mengalami penurunan yang diikuti dengan jumlah penduduk bekerja yang terus meningkat.



Grafik 13. Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014
Sumber : BPS (2017)

4.3 Analisis Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menguatkan hasil analisis terkait ketimpangan ekonomi seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menyertakan analisis kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah dan arah perkembangannya dapat diindikasikan dari nilai disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai bagian dari kesenjangan sosial.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator komposit tunggal yang diharapkan mampu merangkum beberapa dimensi utama pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Dimensi-dimensi utama itu adalah dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indikator dan variabel yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia ini adalah variabel-variabel yang menunjukan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa dimensi-dimensi utama yaitu dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dan dimensi pendidikan, yaitu sebagai berikut:

- Indikator Ekonomi: variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Konsumsi/kapita disesuaikan (ribuan rupiah).
- Indikator Kesehatan : variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Angka Harapan Hidup (tahun).
- Indikator Pendidikan : variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Angka Melek Huruf (%) dan Rata-rata Lama Sekolah (tahun).

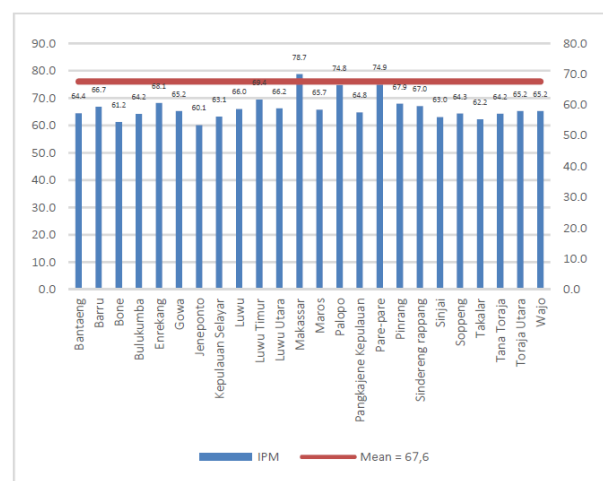
Kesenjangan masyarakat antarwilayah dan arah perkembangannya dapat diindikasikan dari nilai disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beserta tren nilai disparitas dalam periode tertentu. Peningkatan IPM yang diikuti oleh disparitas IPM antarwilayah yang semakin berkurang disebut sebagai perkembangan IPM yang *convergen* atau mengindikasikan arah perkembangan berkurangnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, peningkatan IPM yang diikuti disparitas IPM yang makin melebar (meningkat) disebut sebagai perkembangan *divergen* atau mengindikasikan arah perkembangan meningkatnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Gambaran kesenjangan IPM tersebut dapat dilihat dari kesenjangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 8
Perkembangan Disparitas IPM Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2015
Sumber : BPS (2017)

Nilai IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IPM Max	77.63	77.82	78.47	79.98	79.35	79.94
IPM Min	58.31	58.95	59.62	60.55	61.45	61.61

Disparitas	19.32	18.87	18.85	19.43	17.90	18.33
Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IPM Max	Makassar	Makassar	Makassar	Palopo	Palopo	Palopo
IPM Min	Jeneponto	Jeneponto	Jeneponto	Takalar	Takalar	Takalar

Tabel 8 menunjukkan perkembangan disparitas IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2015 dengan tren cenderung menurun. Perkembangan disparitas IPM menunjukkan arah *convergen*, yaitu dari disparitas IPM pada tahun 2010 sebesar 19,32, berkurang menjadi 18,87 pada tahun 2011 dan 18,85 pada tahun 2012. Nilai disparitas ini diambil dari nilai selisih dari IPM tertinggi di Kota Makassar sebesar 77,63 (2010), 77,4 (2009) dan 78,47 (2013) dengan IPM terendah di Kabupaten Jeneponto sebesar 58,31 (2010), 58,95 (2011), dan 59,62 (2012). Memasuki tahun 2013, disparitas IPM nampak meningkat, namun segera diikuti dengan penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Data ini menunjukkan bahwa kesenjangan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan semakin berkurang. Hal ini mengonfirmasi temuan atau hasil analisis sebelumnya bahwa kesenjangan atau disparitas ekonomi dari tahun ke tahun juga cenderung menurun.



Grafik 14. Rata-rata IPM Kabupaten/Kota Provinsi dan
Kuadran Tipologi
Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan Tahun 2010-2015
Sumber : BPS (diolah)

Dilihat dari nilai rata-rata IPM per kabupaten/kota pada periode penelitian (Grafik 14), IPM pada Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare-pare memiliki nilai IPM di atas rata-rata provinsi yaitu 67,58. Hal ini berarti bahwa secara umum IPM di ketiga kota tersebut lebih tinggi dari IPM kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika kita bandingkan hasil analisis

kesenjangan ekonomi sebelumnya dan kesejahteraan masyarakat pada bagian ini melalui nilai IPM, dapat kita temukan bahwa beberapa kabupaten/kota yang memiliki rata-rata IPM yang tinggi cenderung memiliki disparitas ekonomi yang rendah. Sebagai contoh, Kota Makassar yang memiliki nilai rata-rata IPM tertinggi yaitu 78,70 (di atas rata-rata 67,58), termasuk tipologi daerah maju dan cepat tumbuh (kuadran I). Begitupula, Kabupaten Luwu Timur yang memiliki nilai rata-rata IPM yaitu 69,41 (di atas rata-rata 67,58), termasuk tipologi Kuadran II.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini terkait kesenjangan ekonomi antarwilayah di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Melalui metode Indeks Williamson, tingkat kesenjangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2011-2015 memiliki kecenderungan menurun dengan tingkat kesenjangan ekonomi kategori sedang dengan nilai rata-rata selama 5 tahun sebesar 0,64.
2. Melalui metode Indeks Theil, kesenjangan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan angka yang berfluktuasi. Jika didekomposisi, tingkat kesenjangan antarwilayah lebih besar diakibatkan oleh besarnya kontribusi ketimpangan yang terjadi internal kabupaten/kota dibandingkan ketimpangan dalam provinsi (antarkabupaten/kota), dimana pada tahun 2015 ketimpangan internal kabupaten/kota (*within-region inequality*) menyumbang sekitar 94,84 persen terhadap ketimpangan total.
3. Melalui metode *Klassen Typology*, terdapat beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pergeseran tipologi (perpindahan posisi kuadran). Namun, dari analisis juga ditemukan beberapa wilayah yang selalu berada pada tipologi yang sama (pada posisi kuadran yang tetap). Hasil analisis menunjukkan banyaknya daerah yang berada pada kuadran III dan IV, yaitu kabupaten/kota yang tergolong maju tapi tertekan dan relatif tertinggal (37,50%).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Implikasi kebijakan yang dapat diusulkan berdasarkan hasil analisis di atas dalam mengurangi terjadinya ketimpangan antarwilayah , beberapa hal yang dapat disulukan antar lain:

1. Kebijakan pembangunan hendaknya memprioritaskan daerah yang relatif tertinggal (masuk dalam kuadran IV) tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat. Kabupaten/kota yang masuk dalam tipologi

daerah maju dan cepat tumbuh (kuadran I) dapat memberikan bantuan bagi daerah tertinggal berupa program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas SDM (*human capital*) berupa keterampilan atau skill dan berdampak positif bagi pertumbuhan melalui peningkatan penyerapan ide dan inovasi teknologi serta kewirausahaan. Apalagi kebanyakan kabupaten/kota yang sudah maju dan berkembang cepat mengandalkan sektor industri yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan adanya terobosan-terobosan dalam pembangunan perekonomian daerah, yaitu diantaranya melalui pengembangan pola kerjasama regional antardaerah otonom yang bertetangga, berdasarkan kebersamaan atau kepentingan tertentu untuk menemukan titik *win-win solution*, yaitu melalui pengembangan *Regional Management*.

2. Konsolidasi dan kolaborasi antardaerah (horizontal) atau kabupaten dengan pemerintah provinsi (vertikal) perlu dilakukan dengan membuat perencanaan pembangunan yang jelas agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir. Dengan koordinasi seperti, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada seluruh masyarakat di dalamnya.
3. Membangun konektivitas ekonomi antardaerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.
4. Kesenjangan ekonomi suatu wilayah dapat dikurangi dengan upaya afirmatif yang lebih konkrit untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai bidang yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana perekonomian di daerah-daerah tertinggal, terutama di daerah-daerah yang memiliki disparitas tinggi dan memiliki perkembangan divergen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Puspa Ratih. 2012. Kondisi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen : Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Statistik Indonesia

- Fabia, Aulia. 2006. Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kondisi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen : Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2016. http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/datacenter/index.php?page=indeks_gini
- Klasen, Stephen. 2010. *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*. ADB Sustainable Development Working Paper Series.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Teori Pembangunan Ekonomi. Balai Pustaka, Jakarta
- Kuncoro. 2002. Analisis Spasial dan Regional : Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Satrio, R. W. 2009. Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Pulau di Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen : Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Sholihah, Dyah Hapsari Amalina. 2014. *Pertumbuhan Inklusif : Faktor-Faktor yang Memengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Kelas Menengah di Indonesia*. Sekolah Pasca Sarjana : Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administasi. Alfabeta, Bandung
- Syafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media
- Syahrial. 2014. Analisis Klasifikasi Daerah dan Disparitas Pembangunan Ekonomi antar Propinsi di Pulau Sumatera. Universitas Bengkulu, Bengkulu
- Todaro, M. P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Keempat Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Wicaksono, Cholif, Prasetyo. 2010. Analisis Disparitas Pendapatan antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro, Semarang